

RINGKASAN PUBLIK

PT BUMI PERSADA PERMAI

**Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin
Propinsi Sumatera Selatan
Tahun 2021**

I. PROFIL PERUSAHAAN

A. Identitas Perusahaan

Nama Perusahaan	: PT. BUMI PERSADA PERMAI
Jenis Badan Hukum	: PT (Perseroan Terbatas)
Alamat Lengkap	: Jl. H Adam Malik, No 51 Kel. Thehok, Kec Jambi Selatan, Kota Jambi, Prov. Jambi.
Status Permodalan	: PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
Bidang Usaha	: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT)
Penanggung Jawab Kegiatan	: Mardohar P Aritonang (Direktur)
SK AMDAL yang disetujui	: SK Bupati Musi Banyuasin Nomor 0772 Tahun 2004 tanggal 19 Juli 2004, tentang Persetujuan Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) PT. Bumi Persada Permai di Kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan.
SK IUPHHK – HT	: a. SK Menhut Nomor: 337/Menhut-II/2004, tanggal 07 September 2004, tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Kelas Perusahaan Kayu Serat atas Areal Seluas ± 59.345 Ha. b. Addendum Keputusan Menteri Kehutanan Nomor; SK. 688/Menhut-II/2010 Tanggal 13 Desember 2010, tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Kelas Perusahaan Kayu Serat atas Areal Seluas 60.433 Ha Di Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan

B. Visi dan Misi Perusahaan

VISI

Terwujudnya pengelolaan sumber daya hutan sebagai ekosistem secara efisien dan profesional guna menjamin kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial dalam membangun hutan tanaman

MISI

Untuk mencapai visi tersebut maka perusahaan menuangkannya dalam misi sebagai Berikut:

- Membangun dan mengelola hutan tanaman dengan tujuan produksi kayu secara optimal dengan menerapkan teknologi tepat guna dan dengan dukungan manajerial dan sumberdaya manusia yang handal dan profesional.
- Mempertahankan mutu lingkungan hidup melalui pengelolaan sumberdaya hutan secara benar.
- Melaksanakan perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya pada areal yang telah ditetapkan dalam tata ruang.
- Mengelola sumberdaya hutan sebagai ekosistem secara partisipatif bersama stakeholders.
- Berupaya meningkatkan ekonomi masyarakat setempat melalui peran serta masyarakat secara langsung maupun tidak langsung.

C. Kebijakan Perusahaan

1. Kebijakan Produksi

Operasional Hutan Tanaman Industri harus memperhatikan segala aspek untuk menjamin kelangsungan produksi yang berkesinambungan mulai dari kegiatan pembukaan wilayah hutan, pembibitan, penyiapan lahan, penanaman, pemanenan dan pengembangan yang merupakan komponen dasar dalam kegiatan produksi dimana perusahaan menjamin bahwa :

- a. Kayu dapat diketahui asal usulnya secara legal dengan prinsip lacak balak (CoC).
- b. Kayu yang ditebang tidak melanggar hak masyarakat adat serta sipil.
- c. Kayu yang dipanen di hutan mempertimbangkan nilai-nilai konservasi tinggi yang dilindungi (HCVF).
- d. Tidak memanen kayu dari jenis yang dilarang oleh peraturan pemerintah, daftar merah IUCN & CITES Appendix I.
- e. Kayu dari unit pengelolaan hutan bebas dari pohon rekayasa genetika (GMO).

- f. Kayu yang dipanen sesuai ILO Core Conventions (Human Rights).
- g. Mematuhi semua peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan di tingkat local dan nasional, termasuk berbagai konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Kemudian untuk meminimalisir dampak lingkungan dan sosial maka perusahaan akan melaksanakan beberapa kegiatan yaitu :

- a. Melaksanakan PWH, pemanenan serta penyiapan lahan yang ramah lingkungan dan tidak mengancam kawasan lindung, jenis yang dilindungi serta areal konflik lahan.
- b. Membuat rencana mikro planning beserta verifikasinya untuk pemanenan kayu.
- c. Menjamin ketersediaan alat penyiapan lahan yang memenuhi aspek legal
- d. Menjamin ketersediaan benih yang bukan dari hasil rekayasa genetika
- e. Menyampaikan kebijakan produksi ini kepada semua karyawan, kontraktor dan sub kontraktor serta tamu perusahaan.

2. Kebijakan Lingkungan

Kegiatan Operasional Hutan Tanaman Industri memiliki dampak terhadap lingkungan, Kegiatan tersebut berupa penyiapan lahan, penanaman, penebangan, pemuatan dan pengangkutan kayu, untuk itu perusahaan akan terus menerus mengembangkan daya guna lingkungan dan menanggulangi pencemaran dengan melakukan pengelolaan lingkungan perusahaan akan :

- a. Mengkaji, mengelola, memantau dan mengembangkan sumberdaya hutan sesuai dengan prinsip-prinsip kelestarian.
- b. Mematuhi, melaksanakan dan mengevaluasi peraturan dan perundang-undangan dan persyaratan ketentuan lainnya yang terkait dan relevan (CITIES dan Redlist IUCN).
- c. Menyampaikan kebijakan lingkungan sesuai dengan tujuan dan target lingkungan kepada seluruh karyawan, mitra kerja dan masyarakat sekitar.
- d. Pengembangan Sumber daya Manusia untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan guna menghindari kerusakan lingkungan dan mengembangkan daya guna lingkungan secara terus menerus.
- e. Memelihara dan meningkatkan nilai konservasi pada kawasan yang teridentifikasi sebagai kawasan bernilai konservasi tinggi (High Conservation Value Forest) dan areal High Carbon Stock guna melestarikan jenis-jenis vegetasi dan satwa yang telah masuk dalam kategori dilindungi dan/atau

langka, jarang, terancam punah dan endemic didasarkan peraturan perundangan yang berlaku, CITES dan Redlist IUCN.

- f. Bekerjasama dan menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat sekitar, pemerintah dan kelompok profesional.

3. Kebijakan Sosial

Operasional Hutan Tanaman Industri (HTI) memiliki hubungan yang erat dengan kehidupan sosial masyarakat di sekitar wilayah operasional HTI. Masyarakat merupakan stakeholders penting bagi perusahaan sehingga perusahaan berkomitmen untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Dalam hal ini perusahaan menetapkan kebijakan sebagai berikut :

- a. Menjalankan prosedur FPIC (*Free Prior and Informed Consent*) kepada masyarakat adat dan komunitas lokal.
- b. Bertanggungjawab dalam penanganan keluhan sesuai prosedur *grievance*.
- c. Mengupayakan prosedur resolusi konflik yang bertanggungjawab.
- d. Melakukan dialog terbuka dan konstruktif dengan para pemangku kepentingan ditingkat lokal dan nasional.
- e. Melakukan pemberdayaan program pengemban masyarakat atau CSR (*Corporate Sosial Responbility*).
- f. Bekerjasama dengan multi *stakeholder* dalam pemberdayaan dan pembangunan masyarakat sekitar konsesi perusahaan.
- g. Mewujudkan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan masyarakat dan berkontribusi secara positif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- h. Menghindari penggunaan kekerasan dan pemaksaan kerja, dengan tegas menghapus pekerja anak-anak, serta menghapus diskriminasi di dalam pekerjaan dan profesi kerja.
- i. Mendukung dan menghormati perlindungan hak asasi manusia dan memastikan bahwa perusahaan tidak mendukung pelanggaran hak asasi manusia.

4. Kebijakan Sumber Daya Manusia

Dalam mengelola sumberdaya manusia PT BPP berkomitmen untuk mematuhi prinsip-prinsip dasar pekerja serta menjamin dan melindungi hak-hak pekerja dan hak asasi manusia di seluruh wilayah konsesinya yang dapat memberikan dampak positif berkelanjutan pada penghidupan dan kesejahteraan pekerja, sesuai dengan konvensi

ILO yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia. Selanjutnya PT. BPP 1 memastikan bahwa kebijakan ini dikomunikasikan dan dipahami serta dijalankan oleh perusahaan, pekerja, mitra, dan seluruh pihak yang bekerja untuk dan atas nama PT Bumi Persada Permai.

Untuk mencapai hal tersebut, PT Bumi Persada Permai 1 berkomitmen :

- a. Mematuhi seluruh peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan di tingkat lokal dan nasional, termasuk berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- b. Dalam keadaan dan kondisi apapun untuk tidak melakukan, menggunakan atau dengan cara lain memanfaatkan segala bentuk kerja paksa atau wajib kerja dalam bentuk apapun terhadap pekerjanya di seluruh aktivitas bisnisnya sesuai dengan konvensi ILO No. 29 tentang Kerja Paksa dan Konvensi ILO No. 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa.
- c. Mengakui, menghormati dan merealisasikan hak-hak pekerja termasuk memberikan hak kebebasan dalam berserikat dan Perundingan bersama sesuai dengan konvensi ILO No. 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Konvensi ILO No. 98 tentang Hak Berorganisasi dan Melakukan Perundingan Bersama.
- d. Menjamin perlakuan yang adil dan setara dan tidak melakukan diskriminasi dalam hal jenis kelamin, SARA dan Difabilitas mulai dari proses perekrutan, pemberian upah, pekerjaan dan jabatan dengan cara menerapkan standar yang sama tentang perlakuan yang adil dan setara sesuai dengan konvensi ILO No. 100 tentang Pemberian Upah yang sama bagi pekerja pria dan wanita dan Konvensi ILO No. 111 tentang diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan.
- e. Tidak menggunakan tenagakerja anak-anak di bawah umur dan menghindari serta tidak melakukan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sesuai usia minimal yang telah dituangkan dalam konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimal dan Konvensi ILO No 182 tentang penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
- f. Membayar upah/gaji tidak dibawah standar upah minimum yang telah ditetapkan dan diatur sesuai undang-undang, peraturan pengupahan dari daerah setempat dan perjanjian bersama termasuk yang terkait dengan kerja lembur.

- g. Melakukan perekrutan tenaga kerja yang legal dan sah secara hukum dan sesuai dengan hubungan ketenagakerjaan (Kontrak kerja) yang diakui dan ditetapkan melalui undang-undang.
- h. Memastikan bahwa jam kerjadan hari istirahat sesuai dengan semua undang-undang yang berlaku terkait jam kerja reguler, dan jam lembur termasuk istirahat, waktu istirahat dan setiap pekerjaan lembur harus bersifat sukarela dan dikompensasi sesuai aturan perundangan yang berlaku.
- i. Menyediakan fasilitas yang layak bagi karyawan sesuai dengan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama.
- j. Melaksanakan program pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan tenaga kerja.
- k. Menentang keras segala bentuk kekerasan dan penyalahgunaan wewenang dalam bentuk apapun.

5. Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

PT Bumi Persada Permai mempunyai komitmen dan tekad untuk menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sesuai dengan peraturan perundangan dan standart yang berlaku guna melindungi pekerja, properti dan proses kerja perusahaan. Untuk itu kebijakan perusahaan adalah :

- a. Menciptakan dan memelihara kondisi dan keadaan aman dalam bekerja.
- b. Memberikan pemahaman kepada semua pekerja mengenai keselamatan dan kesehatan kerja termasuk di dalamnya pemahaman tentang HIV/AIDS dan cara pencegahan /penaggulangannya.
- c. Mendorong pekerja untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- d. Menegakkan dan memelihara prosedur keselamatan dan kesehatan kerja serta mewajibkan kepada semua pekerja, kontraktor, dan orang yang berada di dalamnya untuk mematuhi.
- e. Mengembangkan budaya keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan.

6. Kebijakan Lacak Balak Kayu

Sebagai perusahaan HTI yang memiliki visi menjadi perusahaan yang terbaik dalam pengelolaan HTI, PT Bumi Persada Permai berkomitmen untuk melakukan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu yang bersumber dari pengelolaan hutan secara lestari dengan berdasarkan atas prinsip-prinsip lacak balak kayu (CoC). Untuk mencapai

komitmen tersebut, PT Bumi Persada Permai menerapkan praktik-praktik pemanfaatan hasil hutan sebagai berikut:

- a. Mematuhi semua peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan di tingkat local dan nasional, termasuk beberapa konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- b. Melakukan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu dengan baik, dengan menjamin hak-hak Negara atas semua hasil hutan kayu, serta menjamin legalitas hasil hutan kayu yang dikelola.
- c. Memastikan penerapan prinsip segregasi, penandaan dan proses dokumentasi yang baik, jelas dan konsisten disetiap simpul pergerakan kayu sehingga mampu memberikan informasi dan kepastian terhadap ketelusuran asal kayu.
- d. Melakukan perbaikan secara terus menerus melalui kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi pelaksanaan kegiatan CoC.

7. Kebijakan Chemical Management

Sejalan dengan ketetapan manajemen tentang pencapaian sertifikasi FSC pada tahun 2016, maka diperlukan dukungan dan kerjasama semua bagian untuk tercapainya. Salah satu aspek yang penting adalah bahwa Unit Manajemen (UM) PT Bumi Persada Permai dalam mengelola hutannya tidak diperbolehkan menggunakan dan menyimpan jenis-jenis pestisida kategori dilarang menurut standar FSC.

Terkait hal tersebut, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. PT Bumi Persada Permai tidak melakukan pembelian jenis-jenis pestisida kategori dilarang menurut standard FSC sejak 1 Februari 2016
- b. Perusahaan tidak menggunakan dan menyimpan jenis-jenis pestisida kategori dilarang termasuk wadah bekasnya, agar dilakukakan tindakan pengelolaan dengan segera mengirimkan kepihak ketiga
- c. Jika terdapat perbedaan tentang pelarangan penggunaan jenis-jenis pestisida antara standar FSC dengan standar lain maupun peraturan di Indonesia, maka yang dijadikan acuan adalah standard FSC
- d. Melakukan monitoring untuk memastikan penggunaan dan penyimpanan pestisida sesuai dengan prosedur.
- e. Menerapkan pengendalian hama dan penyakit terpadu (*Integrated pest & diseases management*)

8. Komitmen Penerapan FSC-CW

PT Bumi Persada Permai berkomitmenakan menerapkan persyaratan prinsip dan kriteria FSC Controlled Wood (CW) yang terdiri dari :

- a. Kayu yang dihasilkan tidak berasal dari pembalakan liar atau perdagangan kayu dan hasil hutan secara illegal, atau kayu telah diperiksa serta terbukti secara legal asalnya dan lacak balak (COC).
- b. Kayu berasal dari areal yang tidak melanggar hak – hak sipil dan hak masyarakat adat.
- c. Kayu yang dipanen di hutan dimana nilai-nilai konservasi tinggi yang dilindungi oleh kegiatan pengelolaan hutan penilaian HCV /NKT (Nilai Konservasi Tinggi).
- d. Tidak akan melakukan konversi hutan alam secara signifikan menjadi hutan tanaman atau ekosistem berhutan menjadi non hutan
- e. Kayu bukan berasal dari hasil rekayasa genetika /GMO (Genetic Modified Organism)
- f. Kayu yang di panen Tidak melanggar ILO Core Convention (International Labaour Organization).

II. KONDISI UMUM

A. Lokasi & Penataan Ruang

Secara Administrasi pemerintahan areal IUPHHK-HT PT. Bumi Persada Permai terletak pada Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan. Demikian pula secara administrasi kehutanan termasuk kelompok hutan RPH Bayat, RPH Mangsang, CDK Bayung Lencir, BPKH Lalan Hull, wilayah Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Secara geografis, areal tersebut terletak pada :

Blok I - Bayat : $103^{\circ}27'04''$ – $103^{\circ}41'23''$ BT dan $2^{\circ}08'50''$ – $02^{\circ}28'35''$ LS

Blok II – Mendis : $103^{\circ}42'24''$ – $103^{\circ}54'52''$ BT dan $2^{\circ}01'07''$ – $02^{\circ}13'04''$ LS

B. Aksesibilitas

Areal kerja PT. Bumi Persada Permai secara administrasi berada di Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, terdiri dari 2 (dua) unit yang terletak di sisi kiri dan kanan jalan negara (jalur lintas timur sumatera antara Palembang menuju Jambi). Pencapaian lokasi dari Jakarta menuju areal kerja dapat ditempuh dengan 2 (dua) alternatif pencapaian yaitu dengan rute Jakarta – Palembang atau Jakarta – Jambi dengan menggunakan pesawat terbang komersil, waktu tempuh adalah ± 1 jam perjalanan. Areal kerja relatif mudah dijangkau melalui jalur darat baik dari Palembang maupun dari Jambi, karena terlatak pada sisi kiri dan kanan jalan negara (jalur lintas timur sumatera) antara Jambi – Palembang. Dari Palembang menuju lokasi PT. BPP (Mendis atau Selaro) perjalanan dapat dilanjutkan menggunakan kendaraan roda empat dengan waktu tempuh ± 4 jam (± 250 km), sedangkan dari Jambi dapat ditempuh selama $\pm 2,5$ jam (± 60 km).

C. Tata Ruang

Berdasarkan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan kayu pada Hutan Tanaman (RKUPHHK – HT) Tahun 2018-2027 yang telah disetujui oleh Direktur Jendral Bina Produksi Kehutanan dengan Surat Persetujuan Nomor SK.6992/Menlhk-PHPL/UHP/HPL.1/12/2017, keadaan umum areal kerja PT. Bumi Persada Permai.

Berdasarkan hasil tata ruang RKUPHHK-HTI, diketahui bahwa dari luas areal kerja 60.433 Ha. Secara rinci rencana tata ruang PT. Bumi Persada Permai disajikan dalam tabel berikut :

Tabel II - 2. Tata Ruang Areal Kerja PT. Bumi Persada Permai

RENCANA PERUNTUKAN LAHAN	Luasan Ha
Luas Areal IUPHHK – HTI	60.433
Areal Kawasan Lindung	
a. Buffer Zone SM Dangku	632
b. KPSL	822
c. KPPN	960
d. Sempadan Sungai	3691
Jumlah	6.105
Area efektif untuk produksi	
a. Tanaman Pokok	37.845
b. Tanaman Kehidupan	14.850
Jumlah	52.695
Area tidak efektif untuk produksi	
a. Sarana dan prasarana	-
b. Pinjam pakai	1.633
Jumlah	1.633

Sumber : *RKU PT BPP*

D. Penentuan Jenis Tanaman dan Penanaman

Kegiatan penanaman diawali dengan penyiapan lahan tanpa bakar (PLTB), pengangkutan bibit, pelaksanaan penanaman sampai monitoring dan penyulaman. Jarak tanam yang diterapkan untuk jenis *Acacia mangium* dan *Acacia crassicaarpa* adalah 3 m x 2,5 m, yaitu 3 m jarak antar jalur dan 2,5 m jarak pohon. Untuk jenis *Eucalyptus* sp. jarak tanamnya 3 m x 2 m; jenis tanaman unggulan dan kehidupan (4 m x 4 m). Dalam menunjang kegiatan penanaman, perusahaan melakukan *Plantation Progress Assessment (PPA)* yang dilaksanakan sejak awal dimulai proses tanam.

E. Keaneekaragaman Tumbuhan dan Satwa Liar

Secara garis besar flora atau vegetasi alam di areal IUPHHK-HT PT BPP mencerminkan flora khas daratan Sumatera, baik vegetasi yang berada di lantai hutan maupun vegetasi pohon dengan diameter dan tinggi yang cukup besar. Vegetasi alam tersebut antara lain keruing (*Dipterocarpus* sp), Meranti (*Shorea* sp), Jelutung (*Dyera costulata*), *Artocarpus anisophyllea*, palem (*Pholidocarpus sumatranus*) dan lain sebagainya.

Di areal kerja PT Bumi Persada Permai ditemukan beberapa jenis satwa liar, baik dari jenis reptil, burung dan mamalia. Satwa dari jenis reptil yang mempunyai nilai konservasi tinggi (NKT) terdapat 12 spesies, jenis burung (aves) terdapat 20 spesies, sementara untuk mamalia terdapat 12 spesies termasuk 3 spesies merupakan satwa endemik. Satwa liar yang hidup di areal IUPHHK-HT PT BPP yang mempunyai nilai konservasi tinggi

III. KEGIATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

Kegiatan pengelolaan hutan lestari PT. Bumi Persada Permai dilakukan dengan sistem Silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB), yaitu kegiatan pengelolaan hutan yang meliputi kegiatan penyemaian/pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan penebangan yang bertujuan untuk menghasilkan kayu. Pengelolaan hutan dilakukan dengan memperhatikan aspek ekologi dan sosial untuk memproduksi hasil yang berkualitas, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Pembangunan hutan tanaman PT. Bumi Persada Permai ditujukan dalam memenuhi kebutuhan kayu serat (Pulp)

Salah satu pertimbangan terpenting dalam pembangunan hutan tanaman adalah pemilihan jenis pohon yang akan ditanam. PT Bumi Persada Permai dalam hal ini memilih jenis pohon *Acacia mangium*, *Acacia crassicarpa* dan *Eucalyptus pellita*. Sejalan dengan penerapan sistem silvikultur THPB perusahaan mengupayakan penyediaan bibit tanaman melalui persemaian (nursery). PT. Bumi Persada Permai telah membangun persemaian (Nursery) di Blok Mendis dan Blok Selaro untuk menjamin berlangsungnya regenerasi tegakan tanaman pokok guna proses produksi yang berkelanjutan. Di samping regenerasi tanaman pokok, sejalan dengan komitmen pelestarian ekosistem, perusahaan juga tetap berupaya memperbaiki kondisi hutan alam pada kawasan lindung. Hal ini dilakukan dengan mendatangkan bibit spesies lokal. Adapun jenis tanaman lokal yang didatangkan adalah jenis pulai, jabon, waru, jelutung, merawan. Dengan adanya upaya penanaman tanaman local pada kawasan lindung diharapkan kondisi tutupan lahan alami dapat diperbaiki/dipertahankan sehingga regenerasi hutan dapat berjalan secara berkesinambungan dari sisi produksi dan ekologi.

Untuk memastikan produksi yang berkelanjutan dan berkesinambungan, maka berikut disampaikan table tegakan kelas umur per masing-masing jenis.

Tabel III - 1. Data Sebaran Kelas Umur PT Bumi Persada Permai tahun 2020

Uraian	Acacia sp.	Ep	Sub-Total
Tanaman berumur 0 - 1 (2020)	5,633	3,316	8,950
Tanaman berumur 1 - 2 (2019)	1,548	6,307	7,854
Tanaman berumur 2 - 3 (2018)	2,848	5,154	8,002
Tanaman berumur 3 - 4 (2017)	233	5,726	5,959
Tanaman berumur lebih dari 4 tahun	1,158	2,845	4,002

Sumber : Bagian perencanaan PT. BPP

A. ASPEK PRODUKSI

1. Perencanaan

Sebagai dasar kegiatan operasional, PT Bumi Persada Permai telah menyusun Rencana Karya Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (RKUPHHK-HT). RKU ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) perusahaan. RKT selanjutnya menjadi dasar legal di dalam melaksanakan seluruh kegiatan operasional hutan tanaman.

2. Penataan Batas

SK Menhut Nomor: 337/Menhut-II/2004, tanggal 07 September 2004, tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Kelas Perusahaan Kayu Serat PT BPP atas Areal Seluas \pm 59.345 Ha.

Addendum Keputusan Menteri Kehutanan Nomor; SK. 688/Menhut-II/2010 Tanggal 13 Desember 2010, tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Kelas Perusahaan Kayu Serat PT BPP atas Areal Seluas 60.433 Ha Di Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan SK tersebut, perusahaan telah melaksanakan tata batas 100% (temu gelang), sepanjang 198 km dari yang direncanakan dan telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 688/MENHUT-II/2010, pada tanggal 13 Desember 2010.

3. Pembukaan Wilayah Hutan Dan Pengadaan Sarana Prasarana

Pembangunan sarana prasarana meliputi pembangunan jalan dan kanal serta infrastruktur berupa bangunan seperti kantor, camp, persemaian, TPN/TPK, dan lain sebagainya yang dibutuhkan untuk operasional perusahaan. Sarana dan prasarana yang telah dibangun oleh perusahaan untuk mendukung kegiatan pembangunan hutan tanaman di antaranya adalah perkantoran, *Base camp* beserta penunjang lainnya serta pengadaan mobilitas dan alat berat.

Tabel III - 2. Data infrastruktur di PT. Bumi Persada Permai tahun 2019

No	Infrastruktur	Existing	Satuan
1	Camp	2	Unit
2	Kantor	2	Unit
3	Pos Timbang	1	Unit
4	TPK	1	Unit
5	Dermaga	1	Unit
6	Jalan		
	a. Jalan Akses	114,32	Kilometer

b. Jalan Blok	1.096,71	Kilometer
c. Jalan cabang	316,82	Kilometer
d. Jalan Utama	48,44	Kilometer
7 Kanal		
a. Kanal Primer	29,3	Kilometer
b. Kanal Sekunder	268,54	Kilometer
c. Kanal Tersier	1.305	Kilometer

Sumber : PT. BPP, 2020

4. Pembibitan

Untuk memperoleh bibit yang berkualitas tinggi dalam jumlah yang memadai dan tata waktu yang tepat, terutama kebutuhan bibit tanaman pokok *Acacia sp* dan *Eucalyptus* serta tanaman unggulan setempat dan tanaman kehidupan, maka PT. Bumi Persada Permai membangun kegiatan nursery di lokasi PT. Bumi Persada Permai untuk mensupply kebutuhan bibit.

Tabel III - 3. Realisasi Pembibitan PT. BPP Tahun 2020

Realisasi Pengadaan Bibit	
Tahun RKT	Realisasi (bibit)
2020	13.060.006

Sumber: Bagian Perencanaan PT. BPP 2020

5. Penyiapan Lahan dan Pemanenan

Kegiatan penyiapan lahan bertujuan untuk mempersiapkan lahan yang akan ditanami agar bersih dari pohon dan/atau tanaman pengganggu. Kegiatan awal penyiapan lahan berupa pembersihan lahan dari pohon, semak belukar, gulma, dan vegetasi lainnya yang tumbuh di areal tanaman. Kegiatan penyiapan lahan HTI PT. Bumi Persada Permai, menerapkan prinsip **Penyiapan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)**.

Tabel III - 4. Realisasi pemanenan PT. BPP Tahun 2020

Realisasi Pemanenan		
Tahun RKT	Keterangan	Realisasi
2019	Luas (Ha)	7.985
	Volume (m3)	737.262,66

Sumber: Bagian Perencanaan PT. BPP, 2020

6. Penanaman

Kegiatan penanaman diawali dengan penyiapan lahan, pengangkutan bibit, pelaksanaan penanaman sampai monitoring dan penyulaman. Jarak tanam yang diterapkan untuk jenis *Acacia mangium* dan *Acacia crassicarpa* adalah 3 m x 2,5 m, yaitu 3 m jarak antar jalur dan 2,5 m jarak pohon. Untuk jenis *Eucalyptus sp.* jarak tanamnya 3 m x 2 m. Dalam menunjang kegiatan penanaman, perusahaan melakukan *Plantation Progress Assessment (PPA)* yang dilaksanakan sejak awal dimulai proses tanam.

Tabel III - 5. Realisasi kegiatan penanaman PT. BPP Tahun 2020

Realisasi Penanaman	
Tahun RKT	Realisasi (Ha)
2020	8.962

Sumber: Bagian Perencanaan PT. BPP

7. Pemeliharaan Tanaman

Kegiatan pemeliharaan tanaman mengacu pada Standard Operating Procedure meliputi kegiatan pemupukan, penyulaman, pemangkasan cabang (singling), dan penyiangan (weeding). Pelaksanaan pemeliharaan tanaman (luas dan waktunya) mengikuti jadwal penanaman dan jadwal teknis silvikultur HTI. Material yang di gunakan pada kegiatan pemeliharaan mengacu pada material seperti pupuk, pestisida yang bersifat ramah lingkungan, dengan tidak menggunakan jenis-jenis pestisida kategori yang dilarang oleh FSC.

8. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Sebagai bentuk dari konsekuensi yang ditimbulkan akibat kegiatan pembangunan hutan tanaman, maka PT Bumi Persada Permai melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan terutamar berkenaan dengan aktifitas perusahaan. Pengelolaan dapat dilakukan dalam bentuk reduksi, pengumpulan, penyimpanan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3. Pengelolaan dan atau penyimpanan sementara limbah B3 dapat dilakukan sendiri oleh penghasil limbah B3 untuk selanjutnya disampaikan kepada perusahaan yang memiliki izin pengumpulan dan pemanfaatan limbah B3.

Sebagai bentuk upaya penaatan terhadap regulasi terkait pengelolaan limbah B3, Perusahaan telah memiliki Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang digunakan untuk tempat penyimpanan limbah B3 yang dihasilkan.

9. Potensi Tegakan Hutan Tanaman

Inventori (PHI – *Pre Harvesting Inventory*) adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi/data density dan potensi tegakan tanaman Hutan Tanaman Industri pada suatu petak tanam atau blok pada suatu waktu tertentu. *Pre-Harvesting Inventory* (PHI) dilakukan pada tanaman umur satu tahun sebelum tebang untuk mengetahui stocking dan potensi tegakan tanaman untuk perencanaan hutan selanjutnya. Selain bertujuan untuk mengetahui potensi tegakan HTI, juga sekaligus untuk mengetahui keadaan lapangan pada umumnya yang diperkirakan dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, (misal topografi, tumbuhan bawah, kondisi lahan, serangan hama/penyakit dll).

B. ASPEK EKOLOGI

Dasar kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan PT. Bumi Persada Permai yaitu berdasarkan dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Dokumen AMDAL yang telah disetujui oleh Bupati Musi Banyuasin Nomor Nomor 0772 Tahun 2004 tanggal 19 Juli 2004.

1. Pengelolaan Kawasan Lindung

Alokasi Kawasan Lindung berdasarkan dokumen RKUPHHK-HT periode tahun 2018-2027 adalah Kawasan Lindung sebagai sempadan sungai sekitar (KSS) seluas 3.691 Ha, Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) seluas 960 Ha dan Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL) seluas 822 Ha dan Buffer Zone Suaka marga satwa dangku seluas 632 Ha.

2. Pengelolaan dan Pemantauan Flora dan Fauna

Pada areal kawasan lindung terdapat sejumlah jenis vegetasi dan satwa liar yang tersebar di sekitar areal berhutan. Diantaranya yang dilindungi berdasarkan CITES, IUCN, serta peraturan lokal yang mengaturnya.

3. Pengelolaan dan Pemantauan HCV

Penilaian HCVF di areal PT. Bumi Persada Permai sudah dilakukan pada tahun 2014 oleh Ekologika Konsultan. Dari hasil identifikasi di lapangan dapat diketahui nilai-nilai konservasi yang terdapat atau tidak ada pada kawasan-kawasan hutan yang ada di dalam UM, yaitu :

Tabel III - 8. Hasil Identifikasi HCV PT. Bumi Persada Permai

Kategori Nilai Konservasi Tinggi	Sub-kategori	Deskripsi NKT	Temuan
NKT 1 – Keanekaragaman Hayati Penting	1.1	Keanekaragaman hayati di dalam kawasan perlindungan atau konservasi	ADA
	1.2	Spesies hampir punah	ADA
	1.3	Populasi spesies yang terancam, memiliki penyebaran terbatas atau dilindungi yang mampu bertahan hidup (viable population).	ADA
	1.4	Spesies atau sekumpulan spesies yang menggunakan suatu habitat secara temporer	TIDAK ADA
NKT 2 – Lanskap & Dinamika Alamiah	2.1	Bentang lahan luas yang memiliki kapasitas untuk menjaga proses dan dinamika ekologi secara alami	TIDAK ADA
	2.2	Kawasan alam yang berisi dua atau lebih ekosistem dengan garis batas yang tidak terputus (berkesinambungan)	TIDAK ADA

	2.3	Kawasan yang mengandung populasi dari perwakilan spesies	ADA
NKT 3 – Ekosistem Langka atau Terancam Punah	3	Ekosistem langka atau terancam punah	ADA
NKT 4 – Jasa Lingkungan	4.1	Jasa penyediaanairdanpencegahanbanjiruntukmasyarakathilir	ADA
	4.2	Jasa pencegahanerosidansedimentasi	TIDAK ADA
	4.3	Jasa sekat alamuntuk mengcegh meluasnya kebakaranhutanataulahan	TIDAK ADA
NKT 5 –Kebutuhan Dasar untuk Masyarakat	5	Kebutuhan dasar masyarakat local	ADA
NKT 6 – Identitas Budaya Masyarakat	6	Identitas budaya masyarakattradisional lokal	ADA

4. Perlindungan Hutan

Beberapa potensi gangguan terhadap kawasan hutan areal kerja adalah bahaya serangan hama dan penyakit tanaman, adanya kegiatan Illegal logging, serta bahaya kebakaran hutan. Berdasarkan hasil pemantauan secara priodik terhadap perkembangan serangan hama dan penyakit tanaman, maka pemantauan tersebut menemukan adanya 2 (dua) jenis hama tanaman yang menyerang. Jenis-jenis hama yang menyerang tersebut ditemukan serangan dari jenis Ambrosia dan Helopeltis. Namun berdasarkan kriteria intensitas serangan penyakit tanaman semuanya tergolong pada intensitas serangan kecil/rendah. Termasuk di dalamnya untuk tingkat Intensitas serangan penyakit tanaman yang menyerang semuanya masih berada dibawah baku mutu ambang batas ekonomi.

Dalam pengelolaan hutan, tidak ada terjadi gangguan berupa kegaitan illegal logging di PT Bumi Persada Permai. Sebagai tindak lanjut jika terjadi kegiatan illegal loggingi, maka perusahaan melaporkan kebagian terkait termasuk kepihak kepolisian dan instansi pemerintahan sebagai upaya untuk penanggulangan dan pencegahan kegiatan illegal logging di dalam kawasan perusahaan.

C. ASPEK SOSIAL

1. Pembangunan Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan

Hutan merupakan areal yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat sekitar PT. BPP, sebagian besar masyarakat memenuhi kebutuhan dasarnya yang bergantung dengan hutan, misalnya lebah madu hutan, penggunaan air sungai sebagai konsumsi dan mencari ikan untuk sumber protein bagi mereka. Oleh karena itu, perusahaan telah melaksanakan pengelolaan dan memberikan binaan terhadap masyarakat yang ada di

areal sekitar hutan dalam mengelola HHBK baik dalam bentuk sarana pengelolaan maupun pelatihannya.

Pengelolaan dan pemantauan untuk kebutuhan dasar masyarakat ini perlu kolaborasi antara masyarakat dan perusahaan guna tetap terjaganya areal hutan sebagai kebutuhan dasar masyarakat, upaya yang dilakukan perusahaan terhadap kelompok tani yang mengelola HHBK madu yaitu melaksanakan monitoring sistem pemanenan agar dapat dikelola secara terus menerus (berkelanjutan),

Selain pengelolaan HHBK madu, sungai juga merupakan objek yang terpenting bagi kehidupan masyarakat, selain sebagai sumber air bersih bagi kebutuhan konsumsi masyarakat, juga sebagai sumber pendapatan langsung yaitu menjual ikan hasil tangkapannya.

2. Tanaman Kehidupan

PT Bumi Persada Permai telah mengalokasikan areal tanaman kehidupan sesuai dengan peruntukannya berdasarkan tata ruang yang ada. Tanaman kehidupan menjadi salah satu bentuk penyelesaian konflik (resolusi konflik) yang dalam konsep pelaksanaannya mengacu ke pola kemitraan. Alokasi tanaman kehidupan dalam konsesi ini bertujuan untuk meminimalisir konflik dengan masyarakat baik konflik pemanfaatan hasil hutan maupun konflik kawasan hutan, serta mendorong terciptanya kondisi masyarakat yang mandiri dalam membangun wilayah desanya. Dalam pelaksanaannya, pihak masyarakat berkewajiban mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk bersama-sama dengan perusahaan melakukan perlindungan dan pengamanan areal tersebut atas kegiatan yang dilarang (illegal) serta berpedoman pada aturan dan kesepakatan yang disepakati bersama.

3. Ketenagakerjaan

Berdasarkan hasil pemantauan semester 2 tahun 2020, menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja di PT. BPP berjumlah 212 orang yang merupakan karyawan tetap perusahaan. Berdasarkan komposisi penyerapan tenaga kerja lokal dan non lokal, menunjukkan bahwa tenaga kerja lokal berjumlah 186 orang atau sekitar 87 % dan sisanya sebanyak 26 orang merupakan tenaga kerja non lokal.

IV. MONITORING DAN EVALUASI TAHUN 2020

A. Aspek Produksi

Tabel IV – 1. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Aspek Produksi Tahun 2020

No	Parameter	Realisasi	Evaluasi
1	Tanam (Ha)	8.962	Sebelum RKT diterbitkan, alat dan tenaga kerja perlu dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan
2	Tebang (Ha)	7.385	Sebelum RKT diterbitkan, alat dan tenaga kerja perlu dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan
3	Produksi (M3)	737.262	Sebelum RKT diterbitkan, alat dan tenaga kerja perlu dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan
4	Pengadaan Bibit	13.060.006	Sebelum RKT diterbitkan, alat dan tenaga kerja perlu dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan

Sumber : RKT 2020

1. Tanam

Kegiatan penanaman diawali dengan penyiapan lahan, pengangkutan bibit, pelaksanaan penanaman sampai monitoring dan penyulaman. Jarak tanam yang diterapkan untuk jenis *Acacia mangium* dan *Acacia crassiparpa* adalah 3 m x 2,5 m, yaitu 3 m jarak antar jalur dan 2,5 m jarak pohon. Untuk jenis *Eucalyptus* sp. jarak tanamnya 3 m x 2 m. Dalam menunjang kegiatan penanaman, perusahaan melakukan *Plantation Progress Assessment (PPA)* yang dilaksanakan sejak awal dimulai proses tanam

Realisasi tanam tahun 2020 sebesar 8.962 Ha, realisasi ini berdasarkan dari rencana RKT tahun Secara umum pencapaian tanam ini masih perlu ditingkatkan dan masih belum maksimal dikarenakan ada beberapa kendala yaitu masih kurangnya tenaga kerja tanam untuk mencapai target tanam yang sudah ada. Sehingga sebagai bahan evaluasi mendatang sebelum RKT diterbitkan, perlu penyiapan tenaga kerja yang dibutuhkan yang sudah disesuaikan dengan rencana kerja tahun berjalan.

2. Pemeliharaan Tanaman

Kegiatan pemeliharaan tanaman mengacu pada *Standard Operating Procedure* meliputi kegiatan pemupukan, penyulaman, pemangkasan cabang (*singling*), dan penyiangan (*weeding*). Pelaksanaan pemeliharaan tanaman (luas dan waktunya) mengikuti jadwal penanaman dan jadwal teknis silvikultur HTI. Material yang digunakan pada kegiatan pemeliharaan mengacu pada material seperti pupuk, pestisida yang bersifat ramah lingkungan, dengan tidak menggunakan jenis-jenis pestisida kategori yang dilarang

Adapun material yang digunakan secara rinci dijelaskan pada Tabel berikut ini :

Tabel IV.2 Daftar Jenis Pestisida Yang digunakan

a. Distrik Mendis

Jenis	Material	Satuan	Grand Total
Pupuk	AQUASORB,	KG	5
	DOLOMITE,18%,30%,3%,PWD	KG	2,160
	KCL,60%,1%,COARSE	KG	18,036
	ZINC COPPER,15%,10%,6%	KG	26,908
	NPK,13,6,27+4Mgo+0.65B,GR	KG	419,419
	NPK,15,15,15,GRN	KG	846,782
	NPK,15,30,15,TE,XTL	KG	4
	NPK,15-30-15+TE,XTL	KG	14
	TSP,46%,40%,5%,GRN	KG	691,762
	NPK6,30,6,65%P205,2%CA,GRN	KG	19,685
	NPK8,27,8,65%P205,2%CA,GRN	KG	196,892
	NPK8,27,8,80%P205,2%CA,GRN	KG	616,250
COMPOST,7,12-30,5.5,10,GR	KG	1,088,284	
Herbisida	ALLY 20WDG,SYSTEMIC	G	-
	FLUROXYPYR,480g/l,EC,LIQ	ML	4,052,239
	GLYPHOSATE 480g/l,AS,LIQ	L	73,516
	SAFLUFENACIL,70g/l,WG,GRN	G	453,739
	METHYL METSULFURON,20%,WDG,GRN	G	125,644

b. Distrik Selaro

Jenis	Material	Satuan	Grand Total
PU pupuk	AQUASORB, MEDIU(CHG-TO 30000148)	KG	-
	DOLOMITE, 18%, 30%, 3%, PWD	KG	4,500
	KCL, 60%, 1%, COARSE	KG	35,010
	NPK, 13, 6, 27+4Mgo+0.65B, GR	KG	536,845
	NPK, 15, 15, 15, GRN	KG	721,475
	NPK, 29, 10, 10, 3MgO, XTL	KG	40
	TSP, 46%, 40%, 5%, GRN	KG	1,133,193
	NPK8, 27, 8, 80%P205, 2%CA, GRN	KG	1,554,331
COMPOST, 7, 12-30, 5.5, 10, GR	KG	577,234	
Herbisida	ALLY 20WDG, SYSTEMIC	G	-
	FLUROXYPYR, 480g/l, EC, LIQ	ML	6,936,245
	GLYPHOSATE 480g/l, AS, LIQ	L	80,737
	SAFLUFENACIL, 70g/l, WG, GRN	G	31,500
	METHYL METSULFURON, 20%, WDG, GRN	G	115,048
	TRISILOXANE, S240, LIQ	ML	786,332

Sumber : PT. BPP, 2020 *SLR = Selaro ; MDS = Mendis

3. Tebang dan Produksi

Kegiatan penyiapan lahan bertujuan untuk mempersiapkan lahan yang akan ditanami agar bersih dari pohon dan/atau tanaman pengganggu. Kegiatan awal penyiapan lahan berupa pembersihan lahan dari pohon, semak belukar, gulma, dan vegetasi lainnya yang tumbuh di areal tanaman. Kegiatan penyiapan lahan HTI PT. Bumi Persada Permai, menerapkan prinsip **Penyiapan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)**.

Realisasi penebangan tahun 2020 sebesar 7.385 Ha dan realisasi produksi tahun 2020 sebesar 737.262 m³. Realisasi ini berdasarkan dari rencana RKT tahun 2020. Secara umum pencapaian ini masih belum maksimal dan perlu ditingkatkan, hal ini dikarenakan ada beberapa kendala yaitu Kekurangan Alat & Tenaga kerja. Sehingga sebagai bahan evaluasi mendatang sebelum RKT diterbitkan, alat dan tenaga kerja perlu dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan..

Untuk Memastikan produksi yang berkelanjutan dan berkesinambungan, maka berikut disampaikan tabel tegakan kelas umur permasing-masing jenis.

Tabel IV – 3. Data Sebaran Kelas Umur PT. Bumi Persada Permai tahun 2020

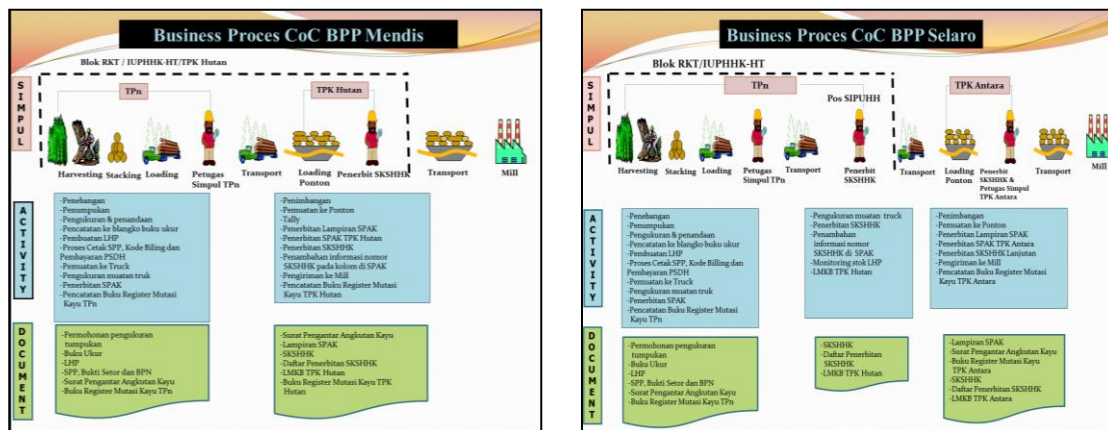
Uraian	Acacia spp.	Ep	Sub-Total
Tanaman berumur 0 - 1 (2020)	5,633	3,316	8,950
Tanaman berumur 1 - 2 (2019)	1,548	6,307	7,854
Tanaman berumur 2 - 3 (2018)	2,848	5,154	8,002
Tanaman berumur 3 - 4 (2017)	233	5,726	5,959
Tanaman berumur lebih dari 4 tahun	1,158	2,845	4,002

Sumber : Bagian perencanaan PT. BPP

4. Chain of Custody

Selain itu, untuk menjamin legalitas kayu yang dihasilkan perusahaan, maka perusahaan juga berkomitmen bahwa kayu yang dihasilkan oleh perusahaan dapat diketahui asal usulnya secara fisik dan legal dengan prinsip lacak balak kayu (*Chain of Custody/CoC*), memastikan penerapan prinsip segregasi, penandaan dan proses dokumentasi yang baik, jelas dan konsisten disetiap simpul pergerakan kayu sehingga mampu memberikan informasi dan kepastian terhadap ketelusuran kayu.

Agar lebih jelas, berikut ditampilkan flowchart alur CoC untuk distrik Mendis dan Selaro.



Gambar 1. Flowchart Bisnis Proses CoC PT Bumi Persada Permai

5. Efisiensi pemanfaatan hutan

Dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan hutan lestari, pada hakekatnya merupakan tata kelola di sektor hulu dalam rangka menjamin kepastian berusaha, dalam pelaksanaan pemanfaatannya perusahaan telah memiliki kebijakan dari perusahaan salah satunya yaitu terkait dengan produksi, adanya penanggung jawab, prosedur dan implementasi yang terdokumentasi serta dapat dipertanggung jawabkan. Dalam menerapkan efisiensi pemanfaatan hutan, perusahaan telah menerapkan system pemanfaatan atau pemanenan kayu yang maksimal, yaitu dengan cara penerapan Mikro planning sebelum pelaksanaan panen, hal ini bertujuan untuk memaksimalkan hasil pemanenan yang ramah lingkungan. Selain itu penerapan sop penebangan dengan memperhatikan tinggi tunggul, sisa potongan dan minimal diameter BBS yang di manfaatkan juga sangat diperhatikan.

6. Potensi Tegakan Hutan Tanaman

Inventori (PHI – *Pre Harvesting Inventory*) adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi/data density dan potensi tegakan tanaman Hutan Tanaman Industri pada suatu petak tanam atau blok pada suatu waktu tertentu. *Pre-Harvesting Inventory* (PHI) dilakukan pada tanaman umur satu tahun sebelum tebang untuk mengetahui stocking dan potensi tegakan tanaman untuk perencanaan hutan selanjutnya. Selain bertujuan untuk mengetahui potensi tegakan HTI, juga sekaligus untuk mengetahui keadaan lapangan pada umumnya yang diperkirakan dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, (misal topografi, tumbuhan bawah, kondisi lahan, serangan hama/penyakit dll).

Berikut hasil Inventory yang dilakukan sampai dengan bulan Desember tahun 2020 PT. Bumi Persada Permai I Blok Selaro dan Blok Mendis rata-rata tiap spesiesnya:

Tabel III.7 Rata-rata Pre Harvesting Inventory PT. Bumi Persada Permai I

Blok	Species	Luas	Stocking		DBH	Tinggi	Potensi (m ³ /ha)	MAI (m ³ /ha/th)
			Jml (ph/ha)	%	Cm	M		
Mendis	- Ac	548.09	949	56.96%	12.00	14.17	88.56	27.98
	- Am	29.18	645	38.68%	13.45	14.40	56.55	10.29
	<i>Eucalyptus sp</i>	1472.86	1088	81.61%	11.98	17.41	80.32	25.82
Selaro	- Ac	2.7	1268	76.06%	16.3	16.8	202.55	20.19
	- Am	59.31	665	39.87%	17.9	18.47	130.61	12.14
	<i>Eucalyptus sp</i>	5738.98	974	73.04%	11.8	16.21	84.16	25.83
Grand Total		7851.12	988	73.15%	11.87	16.30	84.04	25.81

Hasil dari Pre - Harvesting Inventori (PHI) tanaman HTI PT. Bumi Persada Permai I Blok Selaro dan Blok Mendis periode Januari-Desember tahun 2020 yang telah dilakukan adalah seluas 7851.12 Ha stocking rata-ratanya 73.15 % dengan potensi 84.04 m³/ha dan rata-rata MAI 25.81 m³/ha/th.

7. Pengadaan Bibit

Untuk memperoleh bibit yang berkualitas tinggi dalam jumlah yang memadai dan tata waktu yang tepat, terutama kebutuhan bibit tanaman pokok *Acacia spp* terutama jenis *crasicarpa* serta tanaman unggulan setempat dan tanaman kehidupan, maka PT. Bumi Persada Permai membangun kegiatan nursery di lokasi PT. Bumi Persada Permai untuk mensupply kebutuhan bibit.

Realisasi produksi bibit tahun 2020 sebesar 13.060.006 bibit, realisasi ini berdasarkan dari rencana RKT. Secara umum pencapaian produksi bibit ini belum maksimal dan perlu ditingkatkan, hal ini dikarenakan ada beberapa kendala dalam memproduksi bibit yaitu masih kurangnya tenaga kerja nursery untuk mencapai target produksi bibit. Sehingga sebagai evaluasi untuk tahun mendatang sebelum RKT

diterbitkan, perlu penyiapan tenaga kerja yang dibutuhkan yang sudah disesuaikan dengan rencana kerja tahun berjalan.

B. Aspek Ekologi

Monitoring dan evaluasi pengelolaan lingkungan PT. Bumi Persada Permai berjalan sesuai dengan rencana, meliputi Pengelolaan Kawasan Dilindungi, Vegetasi dan satwa dilindungi, pengelolaan tanah dan air, serta perlindungan hutan.

Tabel IV - 6. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Lingkungan/Ekologi Tahun 2020

No	Kegiatan	Lokasi	Rencana	Realisasi	Monev
Pengelolaan Lingkungan					
Kawasan Lindung					
1.	Survey HCVF	Areal Kawasan Lindung dan Desa Sekitar	1x	1 x	Terdapat Laporan final hasil Study HCV yang disusun oleh Tim Ekologika
2.	Rekosntruksi Batas Kawasan Lindung	KPPN, KPSL, KSS dan Bufferzone SM Dangku	20.000	26.911	Melakukan kegiatan pemeliharaan tanda batas dilapangan
3.	Pemasangan plang himbauan di Kawasan Lindung	KPPN, KPSL, KSS dan Bufferzone SM Dangku	5 Pc	7 Pc	Melakukan kegiatan pemeliharaan plang himbauan kawasan lindung yang telah terpasang.
4.	Sosialisasi PADIATAPA	Desa Binaan	12 x	12 x	Sosialisasi terhadap Masyarakat sekitar dengan materi tentang, RKT, Pe rlindungan Hutan dan Program Sosial
5.	Pembuatan & Pemasangan Papan Larangan Membakar	HTI & Batas Konsesi	10 Pc	71 Pc	Pemasangan Papan Larangan Membakar 10 PC dalam konsesi dan batas konsesi.
6.	Pemasangan papan Informasi di Kawasan Lindung	KPPN, KPSL dan KSS	5 pc	7 pc	Perawatan.
7.	Pemasangan papan informasi satwa dilindungi, dan larangan berburu	Camp Kontraktor dan Areal Produksi	5 pc	7 Pc	Bahan informasi bagi pekerja dilapangan.
Tanah dan Air					
1.	Pendugaan nilai erosi tanah metode USLE	Konsesi HTI	2 kali (Semester)	2 kali (Semester)	Metode USLE

2.	Penggunaan pupuk, herbisida & pestisida sesuai rekomendasi	Nursery	Harian	Setiap Hari	Untuk pemakaian pupuk dan herbisida disesuaikan dengan rekomendasi standar yang berlaku.
3.	Pengelolaan Limbah B3	TPS Limbah B3	12 x	12 x	Mencatat keluar masuknya limbah dalam Logbook laporan dan menyampaikan keinstansi teknis setiap semester.

Pengamanan dan Perlindungan Hutan

1	Patroli	Seluruh konsesi	Harian	Setiap Hari	Untuk Patroli dilakukan pada setiap hari oleh security dan karyawan dan direkap dalam bentuk lapaoran 1x dalam satu bulan (Patroli Scurty, RPK, dan secara bersama)
---	---------	-----------------	--------	-------------	---

No	Kegiatan	Lokasi	Rencana	Realisasi	Monev
----	----------	--------	---------	-----------	-------

Pemantauan Lingkungan

Kawasan Lindung

1.	Pemantauan flora dan fauna, identifikasi flora dan fauna dilindungi	Jalur di KSS,KPPN	Dua Jalur	Dua Jalur	Untuk pemantauan flora dan fauna dilaksanakan 1 x dalam satu tahun.
2.	Monitoring Perjumpaan satwa liar di areal HPHTI	Seluruh konsesi	Harian	Laporan harian	Melihat pola penyebaran satwa

Tanah dan Air

1.	Pemantauan fisik tanah dan Pengambilan sample tanah.	Areal Tanaman Pokok	Setiap semester di 2 lokasi	Setiap semester di 2 lokasi	Melihat tingkat kesuburan kualitas tanah
2.	Pengambilan sample air permukaan	Konsesi HTI	Semester	Semester	Melihat dampak pembangunan HTI terhadap kualitas air
3.	Pengukuran debit air dan sedimentasi	Konsesi HTI	Semester	Semester	Melihat dampak pembangunan HTI terhadap kualitas air
6.	Pengukuran erosi tanah	Areal TP	Semester	Semester	Menghitung laju erosi menggunakan metode USLE

6.	Pengukuran iklim Mikro	SPIM	Harian	Setiap Hari	Mencatat Curah Hujan, Suhu rata-rata dan Kelembaban udara.
7.	Kualitas Udara Ambien	Jalur angkutan logging	1 sekali setahun	1 sekali setahun	Mengukur tingkat kualitas udara ambient.
8.	Uji Emisi Gas Buang	Genset	1 sekali setahun	1 sekali setahun	Mengukur emisi gas buang.
9.	Pengelolaan Limbah B3	TPS Limbah B3	12 x	12 x	Untuk penanganan dan pelaporan dilakukan 1 x dalam 1 bulan dan dilaporkan ke instansi terkait dalam laporan triwulan 1 x dalam 3 bulan.
10.	Biota Perairan	Sei. Batang Hari Leko (In-Out),	Setiap semester di 2 lokasi	Setiap semester di 2 lokasi	Melihat kualitas Biota Perairan

Pengamanan dan Perlindungan Hutan

1	Patroli hutan	Seluruh konsesi	12 x	12 X	Untuk Patroli dilaksanakan pada setiap hari oleh security dan karyawan dan direkap dalam bentuk laporan 1x dalam satu bulan (Patroli Security, RPK, dan secara bersama)
2	Monitoring hama dan penyakit tanaman	Tanaman pokok & nursery	Harian	Setiap Hari	Untuk monitoring Hama & penyakit dilaksanakan setiap ada laporan tanaman terserang hama & penyakit.
3	Monitoring rawan kebakaran	Seluruh konsesi	Harian	Setiap Hari	Untuk patroli hal kebakaran dilaksanakan pada setiap hari.

C. Perlindungan Hutan

Beberapa potensi gangguan terhadap kawasan hutan areal kerja adalah bahaya serangan hama dan penyakit tanaman, adanya kegiatan Illegal logging, serta bahaya kebakaran hutan. Berdasarkan hasil pemantauan secara periodik terhadap perkembangan serangan hama dan penyakit tanaman, maka pemantauan tersebut menemukan adanya

2 (dua) jenis hama tanaman yang menyerang. Jenis-jenis hama yang menyerang tersebut ditemukan serangan dari jenis Ambrosia dan Helopeltis. Namun Berdasarkan kriteria intensitas serangan penyakit tanaman semuanya tergolong pada intensitas serangan kecil/rendah. Termasuk di dalamnya untuk tingkat Intensitas serangan penyakit tanaman yang menyerang semuanya masih berada dibawah baku mutu ambang batas ekonomi.

Dalam pengelolaan Hutan, tidak ada terjadi gangguan berupa kegaitan illegal logging di PT Bumi Persada Permai. Sebagai tindak lanjut jika terjadi kegiatan illegal logging, maka perusahaan melaporkan kebagian terkait termasuk kepihak kepolisian dan instansi pemerintahan sebagai upaya untuk penanggulangan dan pencegahan kegiatan illegal logging di dalam kawasan perusahaan.

D. Aspek Sosial

Saat ini PT Bumi Persada Permai memiliki 13 desa binaan yang berada disekitar areal konsesi perusahaan, desa-desa tersebut meliputi Desa: Kali Berau, Desa Pulau Gading, Desa Sindang Marga, Desa Mendis Laut, Desa Margo Mulyo, Desa Pandan Sari, Desa Bayat Ilir, Desa Pagar Desa, Desa Pangkalan Bayat, Desa Simpang Bayat, Desa Telang, Desa Tampang Baru dan Desa Sinar Harapan.

Program CSR yang dilaksanakan di PT Bumi Persada Permai dibagi menjadi lima aspek kegiatan yaitu aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek keagamaan, aspek pendidikan dan Kesehatan serta infrastruktur. Beberapa contoh kegiatan CSR selama Tahun 2020 diantaranya :Bantuan dana untuk perlengkapan kantor camat bayung lencir, Bantuan dana untuk perlengkapan sekolah TK AL-FATH, bantuan dana pengadaan material Renovasi pembangunan rumah ibadah agama Hindu (PURE), bantuan pemasangan solar cell, Bantuan dana Renovasi Gereja GPDI, pembinaan Suku Anak Dalam (SAD), bantuan pengadaan sembako untuk Suku Anak Dalam (SAD)

Pada tahun 2020 PT Bumi Persada Permai mencanangkan Program Sosial berupa "Desa Makmur Peduli Api" (DMPA). Program DMPA tersebut adalah bentuk kerjasama sosial antara pihak perusahaan dengan pihak masyarakat yang initynya membangun dan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar dan membangun rasa tanggung jawab bersama terhadap pengendalian bahaya kebakaran.

1. Pembangunan Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan

Hutan merupakan areal yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat sekitar PT Bumi Persada Permai, sebagian besar masyarakat memenuhi kebutuhan dasarnya yang bergantung dengan hutan, misalnya dengan pengelolaan lebah madu hutan, penggunaan

air sungai sebagai konsumsi dan mencari ikan untuk sumber protein bagi mereka. Oleh karena itu, perusahaan telah melaksanakan pengelolaan dan memberikan binaan terhadap masyarakat yang ada di areal sekitar hutan dalam mengelola HHBK baik dalam bentuk sarana pengelolaan maupun pelatihannya.

Kegiatan pengelolaan hutan yang lestari hanya akan terwujud jika didukung tiga pilar kelestarian yaitu : kelestarian produksi, kelestarian lingkungan atau ekologi, dan kelestarian sosial. Terkait dengan kelestarian sosial perusahaan memiliki kebijakan social sebagaimana yang tertuang dalam bagian sebelumnya. Salah satu program kelola social yang dilakukan adalah melaksanakan program pemberdayaan masyarakat desa sekitar hutan. Arah dari program tersebut adalah terjadinya minimalisasi konflik dengan masyarakat baik konflik pemanfaatan hasil hutan maupun konflik kawasan hutan, serta mendorong terciptanya kondisi masyarakat yang mandiri dalam membangun wilayah desanya.

Manajemen PT. Bumi Persada Permai telah berupaya dalam mengembangkan ekonomi masyarakat sekitar sehingga diharapkan dapat memacu berputarnya roda perekonomian desa. Program tersebut dilaksanakan dalam rangka mengubah ketergantungan masyarakat terhadap hutan melalui pemanfaatan secara optimal. Potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat harus dikembangkan dan ditingkatkan untuk meningkatkan peluang berusaha dan pendapatan masyarakat. Sejauh ini unit manajemen telah memberikan peluang usaha kepada masyarakat sekitar untuk ikut serta dalam pengelolaan hutan melalui sistem kerjasama sebagai kontraktor, misalnya untuk kegiatan penanaman, pemanenan dan pembibitan.

2. Tanaman Kehidupan

PT Bumi Persada Permai telah mengalokasikan areal tanaman kehidupan sesuai dengan peruntukannya berdasarkan tata ruang yang ada. Tanaman kehidupan menjadi salah satu bentuk penyelesaian konflik (resolusi konflik) yang dalam konsep pelaksanaannya mengacu ke pola kemitraan. Alokasi tanaman kehidupan dalam konsesi ini bertujuan untuk meminimalisir konflik dengan masyarakat baik konflik pemanfaatan hasil hutan maupun konflik kawasan hutan, serta mendorong terciptanya kondisi masyarakat yang mandiri dalam membangun wilayah desanya. Dalam pelaksanaannya, pihak masyarakat berkewajiban mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk bersama-sama dengan perusahaan melakukan perlindungan dan pengamanan areal tersebut atas kegiatan yang dilarang (illegal) serta berpedoman pada aturan dan kesepakatan yang disepakati bersama.

3. Hasil Hutan Bukan Kayu

Pengelolaan dan pemantauan untuk kebutuhan dasar masyarakat ini perlu kolaborasi antara masyarakat dan perusahaan guna tetap terjaganya areal hutan sebagai kebutuhan dasar masyarakat, upaya yang dilakukan perusahaan terhadap kelompok tani yang mengelola HHBK yaitu melaksanakan monitoring sistem pemanenan agar dapat dikelola secara terus menerus (berkelanjutan),

Pengembangan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) oleh masyarakat sekitar areal konsesi PT Bumi Persada Permai juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Jenis HHBK yang dimanfaatkan yaitu seperti ikan dan madu. Pengelolaan ini telah dilaksanakan pembinaan dari perusahaan terhadap warga sekitar perusahaan yang mengelola HHBK agar pemanfaatan HHBK dapat di kelola dengan baik. Selain pengelolaan HHBK madu, sungai juga merupakan objek yang terpenting bagi kehidupan masyarakat, selain sebagai sumber air bersih bagi kebutuhan konsumsi masyarakat, juga sebagai sumber pendapatan langsung yaitu dengan memanfaatkan HHBK Ikan dengan sistem Lebak lebung.

4. Ketenagakerjaan

Berdasarkan hasil pemantauan semester 2 tahun 2020, menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja di PT. BPP berjumlah 212 orang yang merupakan karyawan tetap perusahaan. Berdasarkan komposisi penyerapan tenaga kerja lokal dan non lokal, menunjukkan bahwa tenaga kerja lokal berjumlah 186 orang atau sekitar 87 % dan sisanya sebanyak 26 orang merupakan tenaga kerja non lokal.

V. RENCANA KELOLA TAHUN 2021

A. Aspek Produksi

Rencana kelola produksi berdasarkan rencana RKT tahunan PT Bumi Persada Permai, namun untuk RKT PT Bumi Persada Permai memiliki periode waktu pada bulan Januari - Desember. Berikut disajikan rencana kelola aspek produksi untuk tahun 2021.

Tabel V - 1. Rencana Kegiatan Aspek Produksi Tahun 2021

No	Parameter	Rencana
1.	Tanam (Ha)	9.955
2.	Tebang (Ha)	8.737
3.	Produksi (M3)	949.760
4.	Jumlah Produksi Bibit (Batang)	14.603.985

Sumber: RKT PT. BPP, 2020

B. Aspek Ekologi

Berdasarkan hasil studi AMDAL dan HC VF, telah diketahui dampak-dampak yang akan muncul dari kegiatan Hutan Tanaman Industri di PT Bumi Persada Permai dan di dalamnya mencakup rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan. Rencana Kegiatan Lingkungan tahun 2020 dijelaskan pada tabel berikut

Tabel V - 2. Rencana Kegiatan Lingkungan/Ekologi Tahun 2020

No	Komponen Lingkungan	Frekuensi
A	Komponen Fisik Kimia	
1.	Iklm Mikro	Bulanan
2.	Fisik Kimia Tanah (Kualitas Tanah)	Semester
3.	Pendugaan nilai erosi	Semester
4.	Kualitas Air	Semester
5.	Hidrologi	Semester
6.	Bahaya Kebakaran lahan	Bulanan
B	Komponen Biologi	
1.	Pemantauan flora dilindungi dan habitatnya	Tahunan
2.	Pemantauan fauna dilindungi dan habitatnya	Tahunan
3.	Biota Perairan	Tahunan
4.	Potensi tegakan hutan tanaman	Semester
5.	Hama dan Penyakit Tanaman	Bulanan
6.	Areal Tanaman Kehidupan	Semester
C	Pengelolaan Areal HCV	Bulanan
D	Pengelolaan Areal HCS	Bulanan

Sumber: Bagian lingkungan, 2020

C. Aspek Sosial

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, aspek kelola Program CSR Tahun 2021 lebih difokuskan pada kegiatan yang berbasis usaha produktif dan ekonomi berkelanjutan. Hal ini adalah merupakan salah satu perwujudan dari Kebijakan Konservasi Hutan yaitu dengan melibatkan masyarakat lokal secara konstruktif dalam upaya menyelesaikan konflik sosial dan juga memberdayakan masyarakat secara bertanggungjawab.

Dalam mewujudkan Kebijakan Konservasi Hutan, terdapat beberapa tantangan, dan salah satunya adalah tantangan dinamika sosial kemasyarakatan. Pada dinamika sosial kemasyarakatan, masih banyak ditemukannya perambahan hutan, kegiatan pencurian kayu, snegketa tata batas wilayah, pemanfaatan sumber daya hutan dan praktik pertanian oleh masyarakat yang tidak memperhatikan kelestarian hutan.

VI. PENUTUP

Ringkasan pengelolaan Hutan PT Bumi Persada Permai disusun dan didistribusikan kepada para pihak, supaya para pihak dapat mengetahui dan memperoleh informasi tentang Pengelolaan Hutan yang ada di wilayah PT Bumi Persada Permai menurut aspek ekonomi (produksi), aspek lingkungan (ekologi) dan aspek sosial.

Ringkasan Pengelolaan Hutan PT Bumi Persada Permai ini disusun berdasarkan hasil kerja yang dilaksanakan oleh PT Bumi Persada Permai pada tahun 2020 dan rencana kegiatan untuk tahun 2021. Kami menyadari masih banyak hal yang harus dan perlu diperbaiki dalam pengelolaan hutan yang ada pada PT Bumi Persada Permai. Oleh karena itu kami sangat berharap adanya saran/masukan dari para pihak sehingga kami dapat mengelola hutan menuju lestari Produksi, Ekologi dan Sosial secara seimbang.